

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut marut dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan oleh aparat kepolisian yang menangani masalah narkoba terkadang rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari kode etik profesi kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Tugas dan tanggung jawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Polri senantiasa meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin tinggi. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi pada era demokrasi saat ini, Polri semakin dituntut untuk terus meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika dan selain itu anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1), sedangkan Brigadir Devis akan dijerat dengan Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Dan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana akan diikuti dengan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Kepolisian, Kode Etik.

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics abuse has been carried out by law enforcement officials and many have received court trials. This law enforcement is expected to be able as an antidote to the spread of narcotics trafficking. With the spread of narcotics abuse that has a negative impact on people's lives. Although the Indonesian people already have laws on narcotics and psychotropics, in practice, law enforcement related to drug problems is still chaotic and ineffective. The ineffectiveness of the implementation of the law is due to the fact that the police who deal with narcotics problems are sometimes so low that they are often tempted to work with syndicates to get money.

This research has two problem formulations namely what are the factors causing narcotics abuse by members of the police and how criminal liability for members of the police who commit drug abuse in terms of the code of ethics of the police profession. The research method used is to use the normative juridical approach method, and uses descriptive analytical writing specifications and uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and field research by conducting interviews with sources of information that are needed, and using data analysis methods, namely qualitative analysis and drawing conclusions using the deductive method.

The duties and responsibilities of the National Police as the guardian of Kamdagri (internal security) make a very large contribution in overseeing various national development programs. The National Police always improve its professionalism in facing the dynamics of increasingly high task challenges. Moreover, with the development of globalization in the current era of democracy, the National Police is increasingly demanded to continue to increase its existence to gain the trust of the people as the highest authority of the state

Law enforcement can be carried out using Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse and besides members of the Police who abuse narcotics can be charged with Article 114 paragraph (1) Subsider Article 112 paragraph (1), while Brigadier Devis will be charged under Article 131 of the Act Law No. 35 of 2009 concerning drug abuse. And members of the Police who commit crimes will be followed by a trial of the existing Police Professional Code of Ethics.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Abuse, Members of the Police, Code of Ethics.